

Judul : PKS polisikan ketua fraksi Nasdem  
Tanggal : Senin, 07 Agustus 2017  
Surat Kabar : Pelita  
Halaman : 3

## PKS Polisikan Ketua Fraksi NasDem

### Magelang, Pelita

Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) di Dewan Perwakilan Rakyat Victor Bungtilu Laiskodat rencananya hari ini senin (7/8), akan dilaporkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke Mabes Polri terkait pernyataannya yang menuding PKS dan tiga partai lainnya yaitu Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat mirip Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mendukung khilafah, ekstrimis dan radikalisme yang harus dibunuh.

Menurut Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid yang juga politisi PKS pihaknya melaporkan Laiskodat karena pernyataan yang bersangkutan tersebut sebagai fitnah yang keji sehingga harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

"Tuduhan Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR itu adalah fitnah, memecah belah bangsa dan SARA. Tidak bisa diterima di negara demokrasi Pancasila. Victor Bungtilu Laiskodat harus mempertanggungjawabkan tuduhannya itu secara hukum. Tidak cukup hanya minta maaf," kata Hidayat Nur Wahid usai Sosialisasi Empat Pilar MPR di Magelang Jawa Tengah, Sabtu (5/8).

Dia pun menegaskan dari segi etika politik dan hukum Laiskodat tidak bisa lolos dari sanksi. Apalagi dia anggota DPR dan MPR, berkewajiban mengosialisasikan Empat Pilar MPR. "Kok malah menghasut, menyebarkan kebencian, memecah belah bangsa dan mengajak orang

untuk membunuh," tuturnya.

Diingatkannya bahwa wakil rakyat sekelas Ketua Fraksi di DPR seharusnya merekatkan persatuan kesatuan bangsa, membangun jati diri bangsa dan karakter kebangsaan seperti yang sudah bertahun-tahun kami lakukan di MPR dengan menyosialisasikan ke- Empat Pilar kepada seluruh anak bangsa. Oleh karena itu, selain kepada Bareskrim Mabes Polri, PKS bersama Gerindra, PAN dan Demokrat juga melaporkan Laiskodat kepada Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan nasional.

"Kami di elit politik sudah sangat trauma atas kasus mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama (Ahok) yang nyaris memecah belah bangsa. Karena itu, disetiap kesempatan kami bekerja keras agar trauma itu tidak terulang lagi. Eh, malah anggota DPR dan sekaligus MPR malah mengulangnya lagi secara terbuka di depan

umum. Kami sangat menyesalkan sekali," papar Hidayat lagi.

Sementara dalam sosialisasi Empat Pilar di Yayasan Komunitas Insan Kreatif, Hidayat menegaskan, sosialisasi Empat Pilar MPR RI bukan main-main. Itu, perintah UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang menugaskan Pimpinan MPR menyosialisasikan Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa, UUD NRI tahun 1945 sebagai dasar hukum atau konstitusi Negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa dan NKRI sebagai bentuk Negara.

"Karena begitu penting dan wajibna sosialisasi Empat pilar itu, maka anggarannya terus ditingkatkan pada awalnya hanya Rp250 miliar, kini mencapai Rp750 miliar. Bahkan MPR pun mengusulkan kepada presiden agar tugas MPR itu juga dilakukan oleh eksekutif. Untu itulah kemudian, Presiden Joko Widodo membentuk Unit Kerja Presiden (UKP) Pemantapan Ideologi Pancasila (PIP)," ujar Hidayat seraya menambahkan, Presiden tidak main-main terhadap urusan ini hingga dua kali presiden menegaskan, "gebu jika PKI muncul kembali."

Ditegaskan Hidayat, saat ini banyak terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila yang menyebabkan terjadinya kegaduhan politik. Untuk itu dirinya berharap kepada generasi muda yang terhimpun dalam Yayasan Komunika untuk mempertahankan Pancasila



la secara serius. "Penting sekali kaum muda merealisasikan Pancasila," agar dapat mempertahankan keutuhan NKRI," ujar Hidayat.

Langkah strategis lain yang telah dilakukan MPR dalam mensosialisasikan nilai-nilai luhur Pancasila adalah melalui pagelaran seni budaya asli bangsa Indonesia. Diantaranya sudah dilakukan melalui pagelaran seni kebudayaan Minangkabau, Pagelaran Wayang Kulit dan Wayang Orang seperti di Kebondalem Kidul, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah.

"Dengan digunakannya seni budaya untuk menyosialisasi-

kan Empat Pilar, maka MPR pun telah ikut melestarikan seni budaya di seluruh tanah air, menjaga keuhuran budaya bangsa dengan harapan generasi muda Indonesia lebih mencintai budayanya sendiri," paa dia.

Sedangkan Kepala Biro Humas Setjen. MPR RI Siti Fauziah SE, MM saat menyampaikan sambutannya mengatakan metode pagelaran seni budaya untuk sosialisasi Empat Pilar MPR itu akan terus dilakukan, karena bukan hanya sekedar tontonan, tetapi juga menyimpan nilai edukatif. ■ (kh)